

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan tersebut. Pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹

Dalam kegiatan sehari-hari dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yakni perkembangan teknologi yang sangat cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang akan berpengaruh bagi nilai dan perilaku anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.²

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³ Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu dilema dalam masyarakat dimana anak merupakan seorang yang sangat dilindungi hak-haknya serta tidak dapat diperlakukan secara semena-mena seperti halnya orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan perhatian khusus dimana dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak tentunya akan berbeda dengan penjatuhan pidana bagi orang dewasa.

² Shinta Utami F, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung: Bandar Lampung, Hal 2

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 129.

Penjatuhan pidana bagi anak harus memenuhi berbagai unsur serta tidak mengurangi hak-hak nya sebagai seorang anak yang membutuhkan edukasi untuk melanjutkan kehidupan serta masa depannya.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi yang berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana bentuk penerapan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Apakah yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran serta teori bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pembedaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum dan juga diharapkan menjadi bahan bacaan, maupun sumber data atau sebagai kajian penelitian berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam menjaga perlindungan hak-hak anak dari tindakan kekerasan maupun tindakan yang merugikan bagi anak diperlukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ini merupakan upaya negara dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak.

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah sebagai berikut :“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁴ Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam penelitian ini, anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pembunuhan, penadahan serta persetubuhan dimana pelaku dan korban merupakan seorang anak. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang dimana penerapan pidananya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penerapan pidana yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk melindungi hak-hak setiap orang, termasuk anak. Meskipun penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap orang dewasa.

⁴ Dheny Wahyudi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum (Desember 2015) Hal. 146.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif, dimana melakukan analisis melalui putusan pengadilan serta putusan hakim dalam perspektif hukum positif mengenai pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl sesuai dengan peraturan dalam perlindungan anak dikaitkan dengan teori hukum pidana mengenai pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.⁵ yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan buku pustaka berupa buku literatur, karya ilmiah, jurnal maupun informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN, Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl.

⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hal. 12.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui serta memberikan pemahaman dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang kajian teori mengenai tinjauan umum yang berkenaan dengan pengertian pemidanaan, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hak -hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan studi kasus perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/ PN.Kdl

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan penelitian, dan saran.

Daftar Pustaka